

**Implementasi Regulasi Kepemilikan dan Isi Siaran
Sistem Stasiun Jaringan SUN TV Network**

Tesis

Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan

Pendidikan Strata 2

Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi

Universitas Diponegoro

Penyusun

Nama : Agung Mumpuni

NIM : D4C009001

**MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011**

UNIVERSITAS DIPONEGORO
MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
PROGRAM PASCASARJANA

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

IMPLEMENTASI REGULASI KEPEMILIKAN DAN ISI SIARAN SISTEM STASIUN JARINGAN SUN TV NETWORK

Disusun oleh :
Agung Mumpuni
NIM D4C009001

Telah disetujui untuk diujikan di depan Tim Penguji

Semarang, 10 Mei 2011

Pembimbing

Dr.Sunarto
NIP 19660727 199203 1 001

UNIVERSITAS DIPONEGORO
MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
PROGRAM PASCASARJANA

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Nama : Agung Mumpuni
NIM : D4C009001
Program Studi : Kebijakan Media
Judul Tesis : Implementasi Regulasi Kepemilikan dan Isi Siaran
Sistem Stasiun Jaringan Sun TV Network

PEMBIMBING TESIS

Pembimbing

Dr.Sunarto

NIP 19660727 199203 1 001

Ketua Program Studi

Dr.Sunarto

NIP 19660727 199203 1 001

UNIVERSITAS DIPONEGORO
MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
PROGRAM PASCASARJANA

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Agung Mumpuni
NIM : D4C009001
Program Studi : Kebijakan Media
Judul Tesis : Implementasi Regulasi Kepemilikan dan Isi Siaran
Sistem Stasiun Jaringan Sun TV Network

Telah dipertahankan dalam sidang Ujian Tesis Program Magister Ilmu
Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 13 Mei 2011
Waktu : Pukul 08.00-10.00
Tesis dinyatakan : **LULUS**

PANITIA PENGUJI TESIS

Pembimbing : Dr Sunarto (.....)
Ketua Sidang : Dr.Dwi Purboningrum, M.Si (.....)
Sekretaris Sidang : Yanuar Luqman,S.Sos,M.Si (.....)
Reader : Nurul Hasfi,S.Sos,MA (.....)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agung Mumpuni
NIM : D4C009001
Program Studi : Kebijakan Media Angkatan II Magister Ilmu Komunikasi

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang saya susun dengan judul :

Implementasi Regulasi Kepemilikan dan Isi Siaran Sistem Stasiun Jaringan Sun TV Network

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan plagiat dari tesis atau karya ilmiah orang lain, dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Diponegoro maupun universitas lainnya. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

2011

Pernyataan,

Semarang, Juni

Pembuat

Agung Mumpuni
NIM D4C009001

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk:

Keluargaku tercinta,

yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberikan motivasi

Guru-Guruku terhormat,

yang tak lelah membimbing dan membagikan ilmu

Almamaterku,

yang memberi kesempatan untuk belajar

Sahabat dan rekanku,

yang turut mewarnai perjalanan hidupku

dan untuk, Insan-Insan kritis

*yang peduli pengetahuan, kemajuan dan kejujuran
serta menginginkan perubahan pada kehidupan bangsa dan negara*

MOTTO

Mengambil waktu untuk berpikir, karena itu adalah sumber kekuatan.

Mengambil waktu untuk belajar, karena itu sumber kebijaksanaan.

Mengambil waktu untuk bekerja, karena itu merupakan nilai keberhasilan.

KATA PENGANTAR

Dunia penyiaran di Indonesia pada era Reformasi berada dalam dinamika yang penuh gejolak. Keluarnya UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menjadi momentum yang signifikan bagi bergesernya sistem penyiaran di Indonesia. Selain menganut sistem penyiaran lokal berjaringan, regulasi ini mengintroduksi sebuah lembaga semi independen bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk turut serta mengatur semesta penyiaran di Tanah Air.

Dan, sejak bergulirnya UU No 32, peraturan tentang Sistem Stasiun jaringan menjadi wacana yang terus diperbincangkan berbagai kalangan. Dalam peraturan Sistem Stasiun Jaringan disebutkan bahwa lembaga penyiaran swasta komersial dalam menjangkau wilayah siaran ke seluruh Indonesia, harus melakukan pola jaringan, bermitra dengan stasiun televisi lokal di daerah. Sepuluh stasiun televisi nasional yang terlanjur bersiaran secara nasional hanya melalui perantara stasiun relai menjadi target dari semangat UU No 32 yang ingin mewujudkan adanya *diversity of ownership* dan *diversity of content* dalam dunia penyiaran di Indonesia

Di saat 10 stasiun televisi nasional tertatih menjalankan peraturan Sistem Stasiun Jaringan, sejumlah stasiun lokal ternyata sudah mulai membuat pola jaringan, yang dianggap sebagai model ideal siaran sistem jaringan. Namun faktanya, apa yang tampak ideal dari praktik berjaringan televisi lokal, ternyata menyimpan sejumlah persoalan di dalamnya. Stasiun induk jaringan televisi lokal gencar mengakuisisi, melakukan merger, dan mengambil alih televisi-televisi lokal yang sudah memiliki IPP (izin penyelenggaraan penyiaran). Kondisi tersebut mencuatkan masalah kepemilikan stasiun televisi. Akuisisi sejumlah stasiun televisi berisiko memunculkan monopoli bisnis informasi.

Mengatur dunia penyiaran ternyata lebih rumit dibandingkan dengan menerapkan aturan untuk media cetak. Regulasi yang dikeluarkan berusaha menstimulus keikutsertaan sebanyak-banyak orang di dunia penyiaran serta membangkitkan potensi lokal melalui penyiaran televisi. Namun pada kenyataannya, regulasi yang ada tak bisa mengatur dunia penyiaran yang terlanjut

karut marut. Banyak celah regulasi yang bisa diterobos. Model Sistem Stasiun Jaringan televisi lokal yang sedianya akan menjadi model percontohan untuk sebuah semangat *diversity of ownership* dan *content*, ternyata justru terperangkap pada isu pola kepemilikan, praktik produksi dan distribusi produk media yang terkonsentrasi pada kelompok-kelompok bisnis besar. Fenomena konsentrasi media di satu sisi dianggap tak terhindarkan, ketika situasi global menghendaki upaya yang mengarah kepada konsolidasi dan konvergensi dalam bisnis media modern. Namun di sisi lain konsentrasi media juga menimbulkan sejumlah paradoks berkaitan dengan fungsi media sebagai ruang publik dengan sejumlah fungsi sosial yang melekat di dalamnya. Dan, fenomena media tak bisa lepas dari struktur ekonomi dan politik.

Melalui pendekatan studi dokumen, wawancara dan penelitian seksama, penelitian ini mencoba mengkaji tentang praktik penyelenggaraan Sistem Stasiun Jaringan televisi lokal SUN TV Network, serta mencermati ulang regulasi penyiaran yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi, pengetahuan dan literatur, serta pengembangan ilmu utamanya pada bahasan mengenai Sistem Stasiun Jaringan yang berkaitan dengan regulasi kepemilikan dan isi siaran. Tesis ini tentu saja masih jauh dari sempurna karena adanya banyak keterbatasan. Oleh karena itu saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Dan atas selesainya penelitian ini, penulis mengucapkan syukur pada Allah SWT yang tak henti-hentinya memberikan rahmat dan karunia. Terima kasih dan teriring doa untuk almarhum Bapak Djoko Soetjipto, dan almarhumah Ibu Amiyatun yang telah berpulang ke rumah keabadian. Terima kasih yang tak terhingga untuk seluruh keluarga besar yang selalu memberikan *support* (Mas Pur, Mbak Rum, Mas Wiwik, Mbak Tutik, Mas Dodik, Mbak Anna, Mas Wawan dan Mbak Iza, beserta "krucil-krucil"), Dr Sunarto selaku Ketua Program Mikom dan pembimbing tesis, seluruh dosen, serta staf Mikom (Mbak Febri, Mbak Eti, Mbak Heni, Mas Priyo, Mas Rosyid, Mas Totok, Mas Adi), sahabat kompak Angkatan 2 Kebijakan Media (Mas Budi, Pak Irfan, Mbak Mumuk), rekan-rekan S2 Mikom, seluruh informan penelitian (Mas Arief Suditomo, Bapak Ario

Wiryawan, Bapak Dadang Rachmat Hidayat, Bapak Syaharuddin, Bapak Budi Sudaryanto, Mas Uki Hastama, Prof Sasa Djuarsa), Guru Spiritual “Gendheng” (Mas Prie GS), dan kru Tabloid Cempaka, serta semua pihak yang telah membantu baik material maupun non material penulisan tesis ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAKSI	xvi
ABSTRACT.....	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Signifikansi Penelitian	8
1.4.1. Signifikansi Praktis	8
1.4.2. Signifikansi Akademis	8
1.4.3. Signifikansi Sosial	9
1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis	9
1.5.1. Paradigma Penelitian	9
1.5.1.1. Aspek Ontologis	10
1.5.1.2. Aspek Epistemologis	10
1.5.1.3. Aspek Metodologis	11
1.5.1.4. Aspek Aksiologis	11
1.5.2. State of The Art	12
1.5.3. Teori Ekonomi Politik	11
1.5.3.1. Critical Political Economy	13
1.5.3.2. Liberal Political Economy	14
1.5.4. Regulasi Penyiaran	22
1.5.5. Sistem Stasiun Televisi Berjaringan	27
1.5.5.1. Model Siaran Televisi Berjaringan	29
1.5.5.1.1. Afiliation Network	30
1.5.5.1.2. Owned Operated Network	31
1.5.6. Nilai Dalam Sistem Stasiun Jaringan	35
1.6. Asumsi Penelitian	41
1.7. Operasionalisasi Konsep	42
1.7.1. Definisi Konseptual	42
1.7.1.1. Sistem Stasiun Jaringan	42
1.7.1.2. Regulasi Penyiaran	42

1.7.1.3. Kepentingan Ekonomi dan Kepentingan Politik	43
1.7.2. Definisi Operasional	44
1.7.2.1. Sistem Stasiun Jaringan	44
1.7.2.2. Regulasi Penyiaran	46
1.7.2.3. Kepentingan Ekonomi dan Kepentingan Politik	48
1.8. Metoda Penelitian	52
1.8.1. Desain Penelitian	52
1.8.2. Situs Penelitian	53
1.8.3. Subjek Penelitian.....	54
1.8.4. Jenis Data	55
1.8.5. Sumber Data	56
1.8.6. Teknik Pengumpulan Data	56
1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data	57
1.9. Kriteria Kualitas Penelitian	58
1.9.1. Validitas	58
1.9.2. Reabilitas	58
1.9.3. Objektivitas	59
1.10. Keterbatasan Penelitian	60
 BAB II. INDUSTRI DAN REGULASI PENYIARAN DI INDONESIA	
2.1. Lembaga Penyiaran di Indonesia	61
2.1.1. Lembaga Penyiaran Publik	62
2.1.2. Lembaga Penyiaran Swasta	63
2.1.3. Lembaga Penyiaran Komunitas	65
2.1.4. Lembaga Penyiaran Berlangganan	66
2.2. Stasiun Penyiaran Televisi di Indonesia	67
2.2.1. Televisi Republik Indonesia	67
2.2.2. Stasiun Televisi Swasta Nasional di Indonesia	71
2.2.3. Sistem Stasiun Jaringan	81
2.2.3.1. Sistem Stasiun Jaringan LPS Televisi Nasional/Eksisting	82
2.2.3.2. Sistem Stasiun Jaringan Televisi Lokal	85
2.2.4. Stasiun Televisi Lokal Komersial	87
2.3. PT SUN Televisi Network	89
2.3.1. Jaringan SUN TV	91
2.3.2. Coverage Area dan Struktur Organisasi	99
2.4. Regulasi Penyiaran di Indonesia	104
 BAB III. IMPLEMENTASI REGULASI SISTEM STASIUN JARINGAN	
3.1. Kepemilikan Jaringan	113
3.1.1. Saham Induk dan Anggota Jaringan	115
3.1.2. Pembatasan Badan Hukum	120
3.2. Isi Siaran Lokal	121
3.2.1. Muatan Lokal	122
3.2.2. Durasi dan Isi Konten Lokal	126
3.3. Kerjasama Induk dan Anggota Jaringan	132

3.4. Peran Komisi Penyiaran Indonesia	137
BAB IV. EKONOMI POLITIK SISTEM STASIUN JARINGAN	
4.1. Regulasi dan Pembatasan Frekuensi	142
4.1.1. Lisensi Frekuensi	143
4.1.2. Model Ruang Publik	146
4.2. Ekonomi Politik Liberal dan Struktur Pasar SSJ	154
4.2.1. Ekonomi Politik Liberal Sistem Stasiun Jaringan	154
4.2.2. Struktur Pasar Sistem Stasiun Jaringan	163
4.3. Kepentingan Pemerintah, Pasar dan Publik	162
4.3.1. SSJ dan Negara	165
4.3.2. SSJ dan Kepentingan Publik	167
4.3.3. SSJ dan Kepentingan Sosial	168
4.4. Manfaat Sistem Stasiun Jaringan dan Evaluasi Regulasi.....	168
BAB V. PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	184
5.2. Implikasi Penelitian	189
5.2.1. Implikasi Akademis	189
5.2.2. Implikasi Praktis	190
5.2.3. Implikasi Sosial	193
5.3. Rekomendasi Penelitian	194
5.3.1. Rekomendasi Akademis	194
5.3.2. Rekomendasi Praktis	195
5.3.3. Rekomendasi Sosial	197
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perbedaan Program Affiliation dan O&O	34
Tabel 1.2. Demokratisasi Penyiaran.....	37
Tabel 1.3. Perbedaan Lembaga Penyiaran Publik, Komunitas dan Komersial	40
Tabel 1.4. Stasiun Jaringan SUN TV	45
Tabel 1.5. Operasionalisasi Regulasi	46
Tabel 1.6. Regulasi Kepemilikan dan Isi Siaran	47
Tabel 1.7. Penyelenggaraan Sistem Stasiun Jaringan	48
Tabel 1.8. Variabel dan Indikator Kepentingan Ekonomi, Politik, Ideologis	51
Tabel 2.1. Jangkauan LPS Televisi Swasta	79
Tabel 2.2. Peta Kepemilikan Stasiun Televisi	80
Tabel 2.3. Peta SSJ Televisi Lokal	86
Tabel 2.4. Coverage Area & Program SUN TV Network	99
Tabel 2.5. Area & Population PT SUN TV Network	101
Tabel 3.1. Komposisi Kepemilikan Saham	116
Tabel 3.2. Isi Siaran Lokal	129
Tabel 3.3. Komposisi Isi Siaran SUN TV Network	135
Tabel 4.1. Model Pasar dan Model Ruang Publik.....	152
Tabel 4.2. Evaluasi Regulasi	179
Tabel 4.3. Kriteria Hasil Dari Regulasi	179
Tabel 4.4. Bentuk Lembaga Penyiaran di Indonesia.....	184

DAFTAR GAMBAR

Bagan 1.1.	Model Siaran Jaringan	29
Bagan 1.2.	Model Program Afiliasi Networks	31
Bagan 1.3.	Model O & O	32
Bagan 1.4.	Konsepsi Sistem Penyiaran Demokratis	40
Diagram 2.1.	Berdirinya Stasiun Televisi Swasta Nasional	89
Bagan 2.1.	Posisi SUN TV di MNC	91
Bagan 2.2.	Struktur Organisasi SUN TV	103
Bagan 3.1.	Model SSJ SUNTV Network	114
Bagan 4.1.	Sistem Penyiaran Yang Demokratis	153
Bagan 4.2.	Kepentingan dalam SSJ	174

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Penelitian-Penelitian Sistem Stasiun Jaringan
- Lampiran 2. Penggolongan Lembaga Penyiaran
- Lampiran 3. Daftar Televisi Lokal di Indonesia
- Lampiran 4. Regulasi Penyiaran di Indonesia
- Lampiran 5. Area & Population PT SUN TV Network
- Lampiran 6. Coverage Area & Program SUN TV Network
- Lampiran 7. Bagan Posisi SUNTV di MNC
- Lampiran 8. Diagram Peta SSJ di Indonesia
- Lampiran 9. Tabel Implementasi Regulasi SSJ Adopsi Model Grindle
- Lampiran 10. Bangunan Implementasi Sistem Stasiun Jaringan
- Lampiran 11. Bangunan Teoritik Sistem Stasiun Jaringan
- Lampiran 12. Hasil Wawancara Informan 1
- Lampiran 13. Hasil Wawancara Informan 2
- Lampiran 14. Hasil Wawancara Informan 3
- Lampiran 15. Hasil Wawancara Informan 4
- Lampiran 16. Hasil Wawancara Informan 5
- Lampiran 17. Koding Data Penelitian

ABSTRAKSI

Salah satu aspek krusial dalam sistem stasiun jaringan adalah persoalan regulasi. Dengan demikian, dipandang perlu adanya penelitian yang bisa mengeksplorasi tentang praktik sistem stasiun jaringan LPS TV non eksisting, bagaimana implementasi UU Penyiaran terkait dengan kepemilikan dan isi siaran sistem stasiun jaringan, bagaimana praktik ekonomi politik yang terjadi yang terkait dengan kepemilikan dan isi siaran Sistem Stasiun Jaringan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma Post Positivisme. Teori yang digunakan adalah Ekonomi Politik, serta Regulasi Penyiaran yang mengatur tiga hal, yakni struktur, tingkah laku, dan isi. Hasil temuan penelitian, Sistem Stasiun Jaringan Televisi Lokal yang dibangun SUN TV Networks tidak mampu menciptakan *diversity of ownership* karena adanya akuisisi dan pengambilalihan kepemilikan dari stasiun-stasiun lokal di daerah, dengan komposisi saham mayoritas milik SUN Televisi (MNC), berkisar 50-99,99 persen. Namun secara legalitas SUN TV tidak melanggar UU 32 Tahun 2002. Faktor ekonomi politik mempengaruhi pelaksanaan kebijakan sistem siaran berjaringan. Ketentuan minimal 10 persen konten lokal, implementasinya sudah bisa dilaksanakan dengan baik meski dari segi kualitas belum tercapai. Sisi-sisi kelemahan dari regulasi tentang Sistem Siaran Jaringan adalah keterbatasan opsi yang mengatur ranah penyiaran, serta kalimat-kalimat yang tidak dibuat gamblang sehingga memunculkan penafsiran lain. Untuk itulah pemerintah pusat diharapkan konsisten dengan peraturan atau regulasi yang telah dikeluarkan.

ABSTRACT

One crucial aspect in television networking system (SSJ) is a matter of regulation. Thus, it is deemed necessary to research which can explore the practices of network stations LPS system of non existing TV, how the implementation of the Broadcasting Act relating to the ownership and broadcast content network station system, how the political economic practices that relate to ownership and broadcast content Network Station System.

The approach used in this research is the paradigm of Post Positivism. The theory used was of Political Economy, and the Broadcasting Regulations governing the three things, namely the structure, behavior, and content. Research findings, System of Local Television Network stations are built SUN TV Networks are not able to create a diversity of ownership because of the acquisition and takeover of ownership of local stations in the area, with the composition of a majority stake owned by SUN TV (MNC), range 50-99, 99 percent. But the legality of SUN TV does not violate the Act 32 of 2002. Political economic factors affecting the implementation of networked broadcast system. Terms of minimum 10 percent local content, its implementation can be performed well despite not yet been reached in terms of quality. The sides of the weakness of regulation on the Network Broadcast System is the limited options that govern the realm of broadcasting, as well as sentences that are not made explicit so that raises another interpretation. For this reason the central government is expected to be consistent with the rules or regulations have been issued.